

**STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
PADA DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PESISIR BARAT**

Tesis

Oleh

FERI HARDANI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

Economic Development Strategy in the New Autonomous Region of Pesisir Barat Regency

By

FERI HARDANI

The purpose of this study was to determine the strategy of economic development in the new autonomous region of Pesisir Barat Regency. This study uses secondary data obtained through the Central Statistics Agency (BPS) of Pesisir Barat Regency and primary data obtained through surveys. Based on Presidential Regulation No. 63 of 2020 concerning the Determination of Disadvantaged Regions 2020-2025, the Pesisir Barat Regency is included in the list of underdeveloped regions in Indonesia. Underdeveloped regions are regencies whose territories and communities are less developed than other regions on a national scale. Pesisir Barat Regency has many regional potentials such as tourism potential, agricultural potential, and fishery potential. The purpose of economic development in the end is for the welfare of the community, with the right economic development strategy through leading and potential sectors, the goal of economic development for the welfare of the community will be achieved. This study uses analytical tools in the form of location quotient (LQ) analysis, shift share (SS) analysis, overlay analysis, input-output (IO) and analysis hierarchy process (AHP). Based on the analysis that has been done, there are several leading and potential sectors in the Pesisir Barat district.

Keywords: *Leading sectors, economic development, underdeveloped areas*

ABSTRAK

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI PADA DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PESISIR BARAT

Oleh

FERI HARDANI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Strategi pembangunan ekonomi pada daerah otonomi baru Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Barat dan juga Data Primer yang didapat melalui Survei. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2025, Kabupaten Pesisir Barat masuk kedalam daftar Daerah tertinggal yang ada di Indonesia, Daerah tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala Nasional. Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak potensi Daerah seperti potensi pariwisata, potensi pertanian dan potensi perikanan. Tujuan pembangunan ekonomi pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dengan strategi pembangunan ekonomi yang tepat melalui sketor unggulan dan potensial maka tujuan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa Analisis *location quotient* (LQ) , analisis *shift share* (SS), analisis *overlay*, analisis input-output(I-O) dan juga analisis hierarki proses (AHP), berdasarkan analisa yang telah dilakukan terdapat beberapa sektor unggulan dan potensial di kabupaten pesisir barat.

Kata Kunci : Sektor unggulan, pembangunan ekonomi, daerah tertinggal

Judul Tesis : **Strategi Pembangunan Ekonomi Pada Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat**

Nama Mahasiswa : **Feri Hardani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2021021001**

Program Studi : **Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

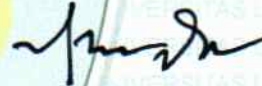
Pembimbing I



Prof Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si
NIP. 19560325 198303 1 002

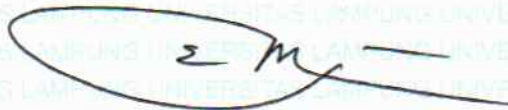
Komisi Pembimbing

Pembimbing II



Dr. Neli Aida, SE., M.Si
NIP. 19631215 198903 2 002

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
Ketua Program Studi



Dr. Marselina, SE., M.P.M
NIP 19670710 199003 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

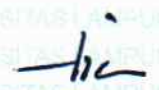
Ketua : Prof Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.



Sekretaris : Dr. Neli Aida, SE., M.Si



Penguji I : Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.SE



Penguji II : Dr. Arivina Ratih Yulihar T., S.E., M.M



2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
Dekan



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.

NIP. 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 Maret 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 April 2022

Penulis



10000
METERAI
TEMBAK
A16C5AJX702112723

FERI HARDANI

**STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
PADA DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PESISIR BARAT**

Oleh

FERI HARDANI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU EKONOMI

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 April 2022
Penulis

FERI HARDANI

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Feri Hardani dilahirkan pada tanggal 21 November 1996 di Lampung Utara. Penulis adalah anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak (alm) Zainal abidin dan Emak Siti Amanah. Penulis memulai pendidikannya penddidikan formal di MIN 6 Lampung Utara dan lulus pada tahun 2008. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 3 Lampung Utara dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikannya di MAN 2 Lampung Utara dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan selesai pada tahun 2019. Di tahun 2020 penulis memulai jenjang pendidikan pada program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.

MOTTO

“ Jangan menggunting dalam lipatan”

(Khanjeng Feri)

“ Hanya orang yang tidak bisa berenang yang mau menantang ombak”

(Habes Arpat)

“ Jika kamu selalu menyalahkan orang lain, maka selamanya kamu akan merasa benar”

(Dul San Abdul)

“

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku hingga saat ini, karya ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Emak dan Bapak , Bapak (alm) Zainal Abidin dan Emak Siti Amanah yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terima kasih tak terhingga kepada Emak dan Bapak karena telah merawat, membesarkan, dan mendidikku tanpa lelah.

Aa dan cece yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta dukungan tiada henti disetiap prosesnya.

Seluruh keluarga, sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan di setiap prosesnya.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Magister Ilmu Ekonomi yang telah memberikan motivasi, ilmu yang bermanfaat serta nasihat yang sangat membantu dan membangun.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pembangunan Ekonomi Pada Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT yang selalu memberi bantuan dan perlindungan
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E.,M.Si. selaku dosen Pembimbing I yang sudah menjadi pengarah dalam penyelesaian thesis ini.
5. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II
6. Ibu Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E. Selaku Dosen Pembahas 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, motivasi, dukungan, semangat serta memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis sehingga tesis ini terselesaikan.
7. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulia T, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembahas 2 yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh

kesabaran, memberikan perhatian, motivasi, dukungan, semangat serta memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis sehingga tesis ini terselesaikan.

8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak, Emak yang tak pernah lelah memberikan doa tulus dan ikhlas. Terimakasih tak terhingga untuk setiap perjuangan, kasih sayang, pengorbanan serta kesabaran bapak dan emak dalam membimbing anakmu hingga saat ini.
10. Aa dan cece terimakasih atas segala nasihat dan motivasi serta dukungan secara moril maupun materil dan memberikan doa tulus untuk keberhasilanku
11. Keluarga Besar Pro-Strategic
12. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah banyak memberikan bantuan serta pelayanan terbaik untuk kelancaran proses penyelesaian Thesis ini.
13. Kepada alien yang tidak turun kebumi, dengan tidak turunnya kalian kebumi menjadi kan saya bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar.
14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 April 2022
Penulis,

Feri Hardani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan	12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka.....	14
2.1.1. Pembangunan Ekonomi.....	14
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.3. Teori Basis Ekonomi	21
2.1.4. Sektor Unggulan.....	21
2.1.5. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai strategi pembangunan daerah	22
2.1.6. Teori Pembangunan Masyarakat (Community Development).....	23
2.2. Tinjauan Empiris	25
2.3. Kerangka Pemikiran	30

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.1.1. Metode Pengambilan Sampel.....	33
3.2. Definisi Operasional	36
3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	36
3.2.2. Sektor Ekonomi.....	36
3.2.3. Kriteria Sektor pilihan	36
3.3. Metode Analisis.....	37
3.4. Prosedur Analisis Data.....	39
3.4.1. Analisis Location Quotient	39

3.4.2. Analisis Shift Share	41
3.4.3. Analisis Overlay	44
3.4.4. Analisis Input-Output	44
3.4.5. Analisis Hirarki Proses	47
3.4.6. Analisis SWOT	53

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil.....	60
4.1.1. Identifikasi, dan analisa sektor basis ekonomi yang memiliki potensi unggulan Daerah Kabupaten Pesisir Barat; serta persepsi para ahli di Kabupaten Pesisir Barat terhadap sektor perekonomian yang peting dan potensial.	60
4.1.2. Strategi pembangunan kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada persepsi Para ahli di Kabupaten Pesisir Barat dan hasil analisa sektor unggulan.....	82
4.2. Pembahasan.....	86
4.2.1. Identifikasi, dan analisa sektor basis ekonomi yang memiliki potensi unggulan Daerah Kabupaten Pesisir Barat; serta persepsi para ahli di Kabupaten Pesisir Barat terhadap sektor perekonomian yang peting dan potensial.	86
4.2.2. Strategi pembangunan kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada persepsi Para ahli di Kabupaten Pesisir Barat dan hasil analisa sektor unggulan.....	97

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	99
5.2. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	3
Tabel 1.2.	Luas Lahan (Ha) Menurut Penggunaan Di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017.....	6
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1.	Daftar Responden.....	34
Tabel 3.2.	Struktur dasar dari Tabel I-O.....	44
Tabel 3.3.	Pembobotan Faktor Internal	54
Tabel 3.4.	Internal Factor Evaluation (IFE).....	55
Tabel 3.5.	Pembobotan Faktor Eksternal.....	56
Tabel 3.6.	External Factor Evaluation (EFE).....	57
Tabel 3.7.	Matriks SWOT ANALYSIS.....	59
Tabel 4.1.	Nilai LQ Kabupaten Pesisir Barat menurut Sektor Ekonomi.....	61
Tabel 4.2.	Nilai LQ Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	62
Tabel 4.3.	Nilai LQ Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	63
Tabel 4.4.	Nilai LQ Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Industri Pengolahan.....	64
Tabel 4.5.	Nilai LQ Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	65
Tabel 4.6.	Nilai LQ Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Transportasi dan Pergudangan.....	65
Tabel 4.7.	Nilai LQ Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	66
Tabel 4.8.	Nilai LQ Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	66
Tabel 4.9.	Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Barat menurut Sektor Ekonomi	67
Tabel 4.10.	Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69
Tabel 4.11.	Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	70
Tabel 4.12.	Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Industri Pengolahan	70
Tabel 4.13.	Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	72
Tabel 4.14.	Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Transportasi dan Pergudangan.....	72
Tabel 4.15.	Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73

Tabel 4.16. Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Barat menurut Sub Sektor pada Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	73
Tabel 4.17. Hasil Analisis Overlay Sektor Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2012-2019	74
Tabel 4.18. Koefisien Input Tabel Input-Output Kabupaten Pesisir Barat	75
Tabel 4.19. Nilai Total Dampak Pengganda Backward Linkages dan Forward Linkages.....	77
Tabel 4.20. Multiplier Output, Income, Nilai tambah.....	78
Tabel 4.21. Subsektor unggulan berdasarkan analisis persepsi para ahli	80
Tabel 4.22. Ringkasan Penilaian pada Matriks SWOT	83
Tabel 4.23. Ringkasan Penilaian pada Matriks EFE	84
Tabel 4.24. Matriks SWOT Kabupaten Pesisir Barat.....	85
Tabel 4.25. Urutan Prioritas Strategi SWOT	86
Tabel 4.26. Sektor Basis (Unggul) dan Kompetitif di Kabupaten Pesisir Barat	86
Tabel 4.27. Subsektor Basis (Unggul) dan Kompetitif di Kabupaten Pesisir Barat	88
Tabel 4.28. Sektor dengan nilai BL dan FL > 1 di Kabupaten Pesisir Barat....	90
Tabel 4.29. ICOR Kabupaten Pesisir Barat, 2016-2020.....	91
Tabel 4.30. Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020.....	92
Tabel 4.31. Sektor unggulan berdasarkan persepsi para ahli.....	93
Tabel 4.32. Dampak sektor unggulan terhadap sektor lainnya	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pemikiran	31
Gambar 3.1.	Struktur hierarki lengkap	50
Gambar 3.2.	Struktur hierarki tak lengkap.....	50
Gambar 3.3.	Struktur Alur Hierarki Penelitian	51
Gambar 4.1.	Kriteria utama Sektor Unggulan Unggulan	80
Gambar 4.2.	Kriteria Utama Sektor Unggulan Unggulan.....	91

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sangat diperlukan, sebagaimana untuk mencapai tujuan pembangunan yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila yaitu mensejahterakan masyarakat. Variasi dari pelaksanaan pembangunan secara konsep mengenal beberapa pendekatan, antara lain (a) pendekatan pembangunan sosial atas-bawah, (b) pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada masyarakat terhadap pembangunan sosial, (c) pendekatan kawasan yang bersasaran multisektor yang terpadu, (d) pendekatan pembangunan sosial dengan melibatkan NGO, (e) pendekatan mobilisasi sumber melalui rangsangan dari pusat (Tjokrowinoto, 1987).

Dalam proses pembangunan tidak ada satu pun pihak yang boleh puas hanya berperan selaku "penonton" yang pasif dan pasrah terhadap keadaan, akan tetapi seyogianya dalam batas-batas tertentu turut aktif sebagai "pemain" yang bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan proporsinya. Konsekuensi logis dari pernyataan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat ialah bahwa seluruh masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara formal melalui berbagai jenis organisasi yang terdapat dalam masyarakat, memungkinkan dan berkesempatan untuk aktif dalam proses pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam urusan-urusan publik yang merupakan pencerminan dari hak demokrasi inilah yang lazim dikenal dengan istilah peran serta atau biasa dipadankan dengan istilah partisipasi masyarakat (*public participation, inspraak*).

Peran serta masyarakat adalah sebagai bagian sentral dalam strategi pembangunan dalam segala bidang. Bila masyarakat mulai berperan serta dalam seluruh aspek pembangunan, yaitu mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan,

pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat, maka tujuan-tujuan pembangunan akan tercapai pula dengan sendirinya. Dalam kaitan ini secara teoritis Lothar Gundling (1980) mengemukakan beberapa manfaat dan dasar bagi peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberi informasi kepada pemerintah
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
- c. Membantu perlindungan hukum
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Slamet M dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan (2003) menegaskan bahwa peran serta masyarakat sangat mutlak demi berhasilnya pembangunan. Tanpa peran serta masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan hasil pembangunan, berarti masyarakat tidak menerima peningkatan kesejahteraan, padahal pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, tanpa peran serta masyarakat, maka setiap proyek pembangunan harus dinilai tidak berhasil. Dengan demikian peran serta masyarakat adalah sebagai bagian sentral dalam strategi pembangunan yang moderen dan demokratis. Bila masyarakat mulai berperan serta dalam seluruh aspek pembangunan, baik pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, maupun pada tahap penerimaan manfaat, maka dengan demikian asumsinya adalah bahwa tujuan-tujuan pembangunan itu pun seyogianya akan tercapai pula.

Otonomi Daerah diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah Daerah untuk mendorong Efisiensi Ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud (Khusaini, 2006). Otonomi daerah yang memuat kebijakan dan arah pembangunan dapat dijalankan pemerintah daerah dengan menjaring kemauan serta keinginan masyarakat (Elmore dalam Tachjan, 2006).

Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan sebuah perencanaan agar arah yang dituju bisa tercapai. Menurut Terry (2005), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi

mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.

Teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah (Siwu, 2000). Pendekatan ini dapat disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Komponen	Konsep lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan, Semakin Banyak Peluang Kerja	Perusahaan Harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk
Basis Pembangunan	Pengembangan sector ekonomi	Pengembangan lembaga ekonomi baru
Aset asset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada asset fisik	Keunggulan kompetitive didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan kalau hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu daerah. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan bahwa, kalau perkembangan ekonominya diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukannya memperkecil ketidakmerataan antar daerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah lainnya akan semakin ketinggalan.

Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut khususnya migrasi tenaga kerja, biasanya bersifat selektif, akibatnya migrasi itu sendiri pun cenderung untuk menguntungkan daerah-daerah yang sedang mengalami ekspansi ekonomi tersebut dan merugikan daerah-daerah lain (Kato, Faridi, *etall*, 2021)

Perpindahan modal cenderung menambah ketidak merataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang/jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah Sernua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan yang timbul karena adanya ekspansi ekonomi dad suatu daerah disebut *backwash effect* (Myrdal, 1957).

Sesuai dengan pendapat Myrdal di atas, Hirschman (1958) juga mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*trickling down effects*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban (*polarization effects*).

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah

No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2025, Kabupaten Pesisir Barat masuk kedalam daftar daerah tertinggal yang ada di Indonesia, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala Nasional. Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan pada kriteria, kriteria tersebut adalah:

- a. perekonomian masyarakat.
- b. sumber daya manusia.
- c. sarana dan prasarana.
- d. kemampuan keuangan daerah.
- e. aksesibilitas; dan
- f. karakteristik daerah.

Kabupaten Pesisir Barat lebih dari 60% luas wilayahnya adalah kawasan hutan lebat yang merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan luas 186.926 Ha, Hutan Lindung Pesisir 9.790 Ha, Kawasan Resapan Air 6.032 Ha., Hutan Produksi Terbatas (HPT) 28.920 Ha, Cagar Alam Laut 8.878 Ha, berikut data luas lahan di kabupaten Pesisir Barat menurut penggunaan ditampilkan dalam tabel:

Tabel 1.2. Luas Lahan (Ha) Menurut Penggunaan Di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Keterangan	Luas
1.	Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	186.926
2.	Kawasan Hutan Lindung	9.790
3.	Kawasan Resapan Air	6.032
4.	Cagar Alam Laut	8.878
5.	Hutan Produksi Terbatas	28.920
6.	Kawasan Pertanian	56.968
7.	Kawasan Perikanan	3.708
8.	Kawasan Industri	78
9.	Kawasan Pariwisata	438
10.	Kawasan Pemukiman	5.053
11.	Kawasan Pertambangan	20

Sumber: Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Barat

Secara gamblang Taman Nasional dapat diartikan sebagai” daerah/kawasan/areal atau tanah yang dilindungi oleh negara”. Taman Nasional sendiri dapat diartikan sebagai tanah yang dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari perkembangan manusia dan polusi. Taman Nasional merupakan kawasan yang dilindungi (*protected area*) oleh World Conservation Union Kategori II. Namun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional bahwa Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditetapkan menjadi Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain kawasan darat seluas $\pm$ 356.800 ha, ditetapkan pula Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan seluas $\pm$ 21.600 ha dalam pengelolaan TNBBS melalui SK Menhut No.71/Kpts-II/1990 tanggal 15 Februari 1990 jo SK Menhut No. 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 CAL BBS seluas 17.280,75 ha.

Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Pesisir Barat terus berbenah mengejar ketertinggalan, mensejajarkan diri atau bahkan melampaui daerah lain di Provinsi

Lampung. Upaya pembenahan dilakukan secara sinergi dan simultan mencakup seluruh bidang dan sektor, baik di sektor pemerintahan, ekonomi, maupun budaya. Upaya tersebut bermuara pada tujuan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Keberhasilan pembangunan di daerah sangat bergantung pada potensi yang dimiliki, serta manajemen pengelolaan potensi tersebut. Untuk itu daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan potensi daerahnya. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah diperlukan adanya kerjasama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha swasta. Pemerintah yang memiliki keterbatasan anggaran membutuhkan dukungan dari masyarakat maupun pengusaha swasta. Kondisi ini berlaku di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu perlu adanya analisis potensi wilayah Kabupaten Pesisir Barat untuk mengetahui potensi-potensi wilayah di Kabupaten Pesisir Barat, sehingga potensi wilayah yang belum dioptimalkan dapat lebih dikembangkan, sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Melalui analisis potensi wilayah diharapkan dapat membantu Memetakan sektor-sektor yang dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan dan pendapatan bagi masyarakat kabupaten Pesisir Barat sehingga strategi pembangunan daerah untuk mensejahterkan masyarakat bisa terwujud.

1.2. Rumusan Masalah

Sektor unggulan adalah suatu sektor yang paling efektif untuk berperan sebagai mesin pembangunan (*engine of development*) dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang mengacu pada kemampuan sektor tersebut untuk mendorong dan menopang pertumbuhan maupun pembangunan seluruh sektor perekonomian.

Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Ciri-ciri sektor yang memiliki keunggulan menurut Sambodo (2006) adalah sebagai berikut:

1. Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
2. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran tenaga kerja yang relatif besar
3. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik keterkaitan kedepan ataupun kebelakang
4. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Berdasarkan nilai tambah yang tercipta pada masing-masing sektor dan sub sektor ekonomi, dapat ditentukan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur ini menunjukkan sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor yang kurang berkembang dalam wilayah tersebut. Dalam jangka waktu yang tidak panjang dan dalam kondisi normal, biasanya struktur perekonomian suatu wilayah tidak mengalami pergeseran yang signifikan.

Kabupaten Pesisir Barat terdapat sektor pertanian yang masih merupakan salah satu pilar utama bagi perkembangan wilayah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat. Dukungan sektor pertanian terhadap PDRB dicapai melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Data dari Dinas Pertanian Kab. Pesisir Barat, Luas lahan pertanian Pesisir Barat mencapai 16.752 Ha, dimana 51,30% atau 8.594 Ha diperuntukkan sebagai lahan persawahan. Dari luas lahan tersebut tanaman padi didaulat menjadi komoditas unggulan dari sektor pertanian, disamping jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Hasil produksi tanaman padi Kabupaten Pesisir Barat tiap tahunnya mencapai 81.890 ton/tahun, dimana 28.7% (25.036 ton/tahun) produksinya terdapat di Pesisir Selatan, disusul Ngambur dengan hasil mencapai 14.606ton/tahun dan Bangkunt dengan produksi mencapai 14.114 ton/tahun.

Komoditas yang menjadi unggulan dari sektor kehutanan Kabupaten Pesisir Barat hingga dikenal ke dunia internasional adalah Damar Mata Kucing (*Shorea Javanica*) dengan luas areal mencapai 17.160,75 Ha dengan Produksi 6.720,20 ton/tahun, selain itu hampir 80% produk damar mata kucing Indonesia berasal dari Kabupaten Pesisir Barat, dan digadang-gadang merupakan damar terbaik didunia yang digunakan sebagai stabilizer pada industri cat, tinta, pharmasi, kosmetik. Negara tujuan ekspor damar mata kucing meliputi: India, Jerman, Philipina, Perancis, Belgia, Uni Emirat Arab, Bangladesh, Pakistan dan Italia.

Yang memiliki luas lahan Damar Mata Kucing terbesar adalah Way Krui dengan luas lahan mencapai 8.510 Ha. Selain itu persebaran hasil getah damar juga banyak dihasilkan dari Karya Penggawa dengan luas lahan mencapai 3.569,5 Ha dan Pesisir Selatan dengan luas lahan mencapai 1.803 Ha. Pengembangan budidaya damar memiliki dua manfaat sekaligus yaitu pelestarian hutan dan penunjang ekonomi. Dengan hasil potensi damar yang cukup besar, membuat Kabupaten Pesisir Barat menjadi penghasil utama damar mata kucing di Lampung, bahkan termasuk di Indonesia. Hasil hutan Kabupaten Pesisir Barat lainnya adalah bambu, gula enau, sarang burung, dan kayu jati.

Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Pesisir Barat tersebar di seluruh wilayah yang terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap berada di sepanjang ± 210 km dari garis pantai Kabupaten Pesisir Barat atau 19% dari panjang garis pantai Provinsi Lampung, yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Sejauh 0-4 mil (± 168.941 ha) adalah merupakan wilayah tangkap yang dikelola Kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah nelayan mencapai 2.252 orang. Potensi ikan tangkap di perairan Kabupaten Pesisir Barat mencapai 142.197 ton/tahun (BPS Kab Pesisir Barat) dengan total produksi mencapai 12.264.37-ton atau hanya 8,6%. Potensi ikan bernilai ekonomis tinggi yang dihasilkan diantaranya ikan Thughuk/Blue Marlin sebesar 73 ton/tahun,

sentra terbesarnya terdapat di Lemong dengan Jumlah produksi sebesar 60 ton/tahun (82.19%), Ikan Tuna sebesar 83 ton/tahun, jumlah produksi tuna terbesar terdapat di Lemong dengan jumlah produksi Sebesar 50 ton/tahun (60.24%), ikan tongkol/cakalang sebesar 160 ton/tahun, jumlah produksi ikan cakalang hanya terdapat di Lemong dan Pesisir Utara dengan jumlah produksi 80 ton/tahun, ikan Hiu sebesar 16 ton/tahun, jumlah produksi Hiu terbesar terdapat di Lemong dengan jumlah produksi sebesar 15 ton/tahun (93.75%), Udang sebesar 81 ton/tahun, sentra Udang terbesar terdapat di Ngaras dengan jumlah produksi sebesar 80 ton/tahun (98.76%), ikan kakap hanya terdapat di Lemong dengan produksi 5 ton/Tahun, ikan kerapu mencapai 17 ton/tahun, dengan sentra produksi kerapu terdapat di Lemong, ikan tenggiri hanya terdapat di Pesisir Utara dengan produksi 4 ton/Tahun, gurita sebesar 11 ton/tahun, dengan produksi gurita terbesar terdapat di Lemong dengan jumlah produksi sebesar 10 ton/tahun (90.90%). Di perairan pantai Pesisir Barat juga sering ditemui sumberdaya laut yang termasuk golongan hewan yang dilindungi, seperti penyu, ikan lumba-lumba dan ikan paus.

Kabupaten Pesisir Barat yang dianugerahi garis pantai sepanjang 210 km yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki banyak sekali obyek wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan. Dimana pada umumnya, pesona dan aktivitas yang ditawarkan pada obyek wisata pantai adalah snorkeling, surfing, menyelam, berenang, berlayar, berperahu motor, memancing, berjemur matahari, spooning nooks, menikmati panorama alam, fotografi, upacara adat pada saat tertentu, berkemah, trekking dan bersepeda. Untuk sektor Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat memiliki 49 Wisata Pantai, dengan lahan seluas 213,5 Ha.

Obyek wisata lain selain wisata pantai dan wisata alam adalah wisata budaya/religi. Berbagai kegiatan adat istiadat masyarakat asli Lampung Krui masih tetap ada dan lestari, sehingga dapat dijadikan sebagai potensi wisata budaya. Adapun daya tarik yang ditawarkan seperti upacara adat serta berbagai kesenian daerah. Selain itu, tempat-tempat bersejarah juga banyak dijumpai yang berguna untuk apresiasi seni dan budaya, penelitian sejarah serta ziarah. Selanjutnya Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki beberapa kegiatan/event budaya yang rutin diselenggarakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, antara lain sebagai berikut :

- *Festival Teluk Stabas*, merupakan salah satu festival ragam budaya yang ada di daerah Pesisir Barat. Pelaksanaannya merupakan rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kegiatan Teluk Stabas ini diadakan perlombaan budaya dan olahraga lain: kebut Pesagi, Kebut Jukung (sampan), Pawai Budaya, dan lomba tarian adat tradisional.
- *Ngumbai Lawok*, merupakan pesta rakyat yang bermakna sedekah laut (ruwat laut). Pesta ini dilakukan setahun sekali di Krui Kec. Pesisir Tengah.
- *Ngambur Fair*, merupakan kegiatan pameran dari setiap yang menampilkan kekayaan budaya dan hasil pembangunan dari setiap yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.
- *Krui Fair*, merupakan event pameran pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Pameran ini dalam pelaksanaannya bersanding dengan kegiatan Festivas Teluk Stabas.

Kabupaten Pesisir Barat telah sejak lama merupakan salah satu tujuan wisata baik di Provinsi Lampung maupun di Pulau Sumatera secara umum. Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat tidak hanya dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Uraian diatas menunjukkan bagaimana kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak sumber-sumber dan bahan baku produksi baik untuk dijadikan barang, maupun dijadikan jasa, sesuai dengan pengertian faktor produksi menurut Harahap (2004) dalam buku teori akuntansi menyatakan bahwa faktor produksi terdiri dari Faktor produksi alam, Faktor produksi tenaga kerja, Faktor produksi modal, dan Faktor produksi pengusaha/kewirausahaan.

Berdasarkan potensi yang di uraikan diatas dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah yang menjadi sektor basis ekonomi dan potensi unggulan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, serta Bagaimanakah persepsi para ahli di Kabupaten Pesisir Barat terkait perekonomian unggulan pada sektor perekonomian yang peting dan potensial?
2. Bagaimanakah Strategi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada persepsi ahli di Kabupaten Pesisir Barat dan hasil analisa sektor unggulan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Identifikasi, dan analisa sektor basis ekonomi yang unggulan dan Kompetitif di Kabupaten Pesisir Barat; serta persepsi para ahli di Kabupaten Pesisir Barat terhadap sektor perekonomian yang peting dan potensial di tingkat Provinsi Lampung.
2. Strategi pembangunan kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada persepsi Para ahli di Kabupaten Pesisir Barat dan hasil analisa sektor unggulan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberi kemudahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam mempublikasikan potensi investasi Kabupaten Pesisir Barat;
2. Terinventarisasinya persepsi para ahli di Kabupaten Pesisir Barat terhadap sektor perekonomian yang dianggap potensial.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut :

I. Pendahuluan.

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Menguraikan secara ringkas landasan teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, bab ini berisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dikaji dan dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pikir, serta beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian tersebut.

III. Metode Penelitian

Memuat tentang metode pencarian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, berserta sumber data dan batasan variabel.

IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menyajikan hasil estimasi data melalui alat analisis yang telah di sediakan.

V. Simpulan

Berisi kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000). Todaro (1992) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak. Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Prof. Meier (2005) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Sadono Sukirno (1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2012) menuliskan setidaknya ada 4 teori klasik dalam pembangunan ekonomi, yaitu Linear Stages Development Model Approach, Structural Change Theory, International Dependence Model dan Neoclassical Counterrevolution.

Perbedaan kondisi setiap daerah membawa implikasi bahwa pola pembangunan yang akan diterapkan setiap daerah berbeda beda sesuai dengan karakteristik dan ke khasan daerah, karena peniruan pola kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu daerah yang berhasil belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Sehingga kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi, permasalahan, serta potensi yang di miliki daerah yang bersangkutan (Arsyad ,2010).

Rahardjo Adisasmita (2005), menyatakan bahwa pembangunan wilayah (*regional*) merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Teori pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian penting dalam analisis ekonomi regional, karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional/daerah yang mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, dimana sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi regional adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan adapula daerah yang tumbuh lambat. Pada teori pertumbuhan ekonomi regional memasukkan unsur lokasi dan wilayah secara eksplisit (Sjafrizal, 2008).

Pada hakekatnya teori teori pembangunan ekonomi daerah membahas tentang metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Pengembangan dari metode metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaanya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan- tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang ada.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000). Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* (GNP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu propinsi, kabupaten atau kota. Definisi pembangunan tradisional ini sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara menjadi negara industrialisasi. Kontribusi sektor pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Jelasnya bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Mudrajat, 2003).

Salah satu aspek pembangunan wilayah (*regional*) adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan perekonomian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi, serta perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep pembangunan wilayah (*regional*) sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi.

Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa, terdapat beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Salah satu klasifikasinya adalah faktor fisik dan manajemen. Secara spesifik disebutkan terdapat 3 faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun ini tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif. Faktor utama lainnya adalah kemajuan teknologi.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Beberapa ahli ekonomi pembangunan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Lincolyn, 2010).

Demikian pula menurut Bendavid-Val (1991), menyatakan bahwa semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor *basic*, sedangkan sektor *non-basic* hanyalah yang mencakup aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi input untuk produk-produk di sektor *basic*, melayani industri-industri di sektor *basic* maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor *basic*.

A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperlihatkan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan

produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu daerah dengan periode tertentu. Analisis tentang perencanaan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya menggunakan PDRB sebagai data dan informasi yang mendasar (BPS RI, 2021).

Penyajian PDRB terdapat dua cara, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau dikenal dengan PDRB nominal adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan (pengeluaran) yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan pada tahun yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau dikenal dengan PDRB riil adalah semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi, dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (BPS RI, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia RI Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diambil dari data PDRB adalah:

- a. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi dalam suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu pula sebaliknya.
- b. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun
- c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar merupakan basis perekonomian suatu wilayah.
- d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.

- e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Data PDRB menggambarkan kemampuan wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Secara teoritis, pada tingkatan tertentu nilai tersebut juga mencerminkan besarnya nilai tambah atau pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dimana dalam PDRB terdiri dari tujuh belas sektor ekonomi yaitu (a). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (b). Pertambangan dan Penggalian, (c). Industri Pengolahan, (d). Pengadaan Listrik dan Gas, (e). Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (f). Kontruksi, (g). Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (h). Transportasi dan Pergudangan, (i). Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum, (j). Informasi dan Komunikasi, (k). Jasa Keuangan dan Asuransi, (l). Real Estate, (m). Jasa Perusahaan, (n). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (o). Jasa Pendidikan, (p). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (q). Jasa Lainnya (BPS RI, 2021).

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menghitung PDRB menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia diantaranya adalah:

- a. Pendekatan Produksi, adalah nilai PDRB merupakan penjumlahan nilai dari nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh daerah bersangkutan pada periode atau tahun tertentu. Produksi barang dan jasa PDRB dikelompokkan menjadi tujuh belas sektor ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2010.
- b. Pendekatan Pengeluaran digunakan pada PDRB merupakan penjumlahan dari nilai pengeluaran yang dilakukan pada daerah bersangkutan. Dalam hal ini komponen pengeluaran meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan model tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto.
- c. Pendekatan Pendapatan, yang digunakan pada PDRB adalah penjumlahan dari unsur-unsur pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat. Unsur pendapatan masyarakat adalah sewa (s) untuk para pemilik tanah dan bangunan, gaji dan upah (w) untuk para pekerja, tingkat pengembalian

modal atau harga (r) untuk para pemilik modal, dan keuntungan (π) untuk para wirausahawan.

Hasil perhitungan PDRB yang ditampilkan terdapat tiga bentuk :

- a. PDRB Dengan Harga Berlaku, merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihitung dengan harga pada periode tahun tertentu. Kenaikan harga dapat berubah setiap tahunnya.
- b. PDRB Dengan Harga Konstan, merupakan nilai dengan harga pada tahun yang ditentukan (tahun dasar). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan nilai harga tidak termasuk.
- c. PDRB Nonmigas, merupakan nilai produksi barang dan jasa selain minyak dan gas bumi. PDRB diperlukan untuk menghitung pendapatan perkapita sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat

Sektor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dalam PDRB di Indonesia
Terdiri dari 17 sektor, sektor-sektor tersebut adalah:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang Kegiatan ini mencakup pengelolaan berbagai limbah/
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17. Jasa Lainnya

2.1.3. Teori Basis Ekonomi

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi, luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 2001). Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional.

2.1.4. Sektor Unggulan

Sektor Unggulan merupakan derivasi dari sebuah postulat yang dikembangkan dalam kajian perdagangan internasional, di mana suatu negara harus memiliki sebuah keunggulan. Selanjutnya kata keunggulan tersebut mewarnai wacana perdagangan dalam negeri, dan implikasinya di masing masing negara yang masuk dalam perdagangan internasional mengembangkan ekonominya berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki.

Postulat dari *comparative advantage* adalah bahwa jika sebuah bangsa ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam perdagangan internasional, maka perlu adanya keunggulan comparative absolute yang dimiliki suatu bangsa atau negara (Dominick Salvatore, 1996). Implikasinya adalah suatu bangsa diharapkan tidak terlalu berambisi mengembangkan komoditas secara menyeluruh yang justru tidak memberikan keunggulan comparative jika diperdagangkan, baik secara nasional maupun secara internasional.

Jika pengertian tersebut ditarik dalam konteks pembangunan regional, maka suatu daerah yang ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam interaksinya dengan region atau daerah lain, maka daerah tersebut harus mengembangkan salah satu sektor yang mempunyai keunggulan (*comparative advantage*). Keunggulan *comparative* tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai konskuensi dan peningkatan kinerja Perekonomian Daerah.

2.1.5. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai strategi pembangunan daerah

Menurut Arsyad (2010) permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi.

Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat dalam sejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan beberapa sektor primer. Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju (*snow ball effect*) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat

dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil- hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

2.1.6. Teori Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Community development (pengembangan masyarakat) adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas

yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi saling menguntungkan saling timbal balik, dan pembelajaran terus menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau saran yang diperlukan dan memberdayakan mereka (Anwar, 2003).

Pengembangan masyarakat sering kali diimplementasikan dalam bentuk kegiatan. *Pertama*, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab (Payne, 1999). Dengan demikian pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruh terhadap proses-proses yang memengaruhi hidupnya. Menurut Twelvetress, pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve own communities by undertaking collective actions.”* secara Khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan (Edi Suharto, 2003).

2.2.Tinjauan Empiris

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
Muhamma d Nasir	Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten yang ada di Sumatera Utara	Melihat sektor unggulan pada provinsi sumatera utara	LQ dan analisis Regresi Data Panel	Hasil perolehan data bahwa dari sembilan sektor ekonomi yang ada terdapat dua sektor yang unggul yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Untuk sektor unggulan pertanian koefisiennya bertanda positif artinya peningkatan nilai LQ meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan untuk sektor unggulan pertambangan dan penggalian koefisiennya bertanda negatif artinya mengakibatkan pertumbuhan ekonominya menurun.
Ali Tutupoho (2019)	Analisis Sektor Basis dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota)	Meilihat Pengaruh sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi maluku	analisis Dinamic Location Quotient (DLQ) dan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji koefisien	Hasil perolehan data bahwa variabel sektor basis dan sektor non basis memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. Dalam hal ini berarti jika sektor basis dan sektor non basis ditingkatkan maka akan dipengaruhi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku.

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
			determinasi, uji statistik F, dan uji statistik T	
Kalzum R. Jumiyyati 2018	Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo	Melihat sektor basis dan non basis di Kabupaten Gorontalo	Analisis Location Quotient (LQ)	Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Gorontalo dan perbandingannya dengan PDRB Provinsi Gorontalo untuk mencari sektor basis pada daerah tersebut didapatkan sektor petambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor kontruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi basis sektor di Kabupaten Gorontalo. Dari ketujuh sektor basis tersebut, sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang paling stabil untuk dijadikan kegiatan basis wilayah dan memberikan banyak sekali dampak positif dari sektor ini.
Emillia, Syaifudin, dan Rahma Nurjannah	Analisis Tipologi Pertumbuhan Sektor Ekonomi Basis dan Non-Basis dalam	Melihat sektor basis dan nonbasis dalam perekonomian do provinsi jambi	Analisis LQ, dan Tipologi klasen	analisis LQ didapatkan lima sektor ekonomi basis yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel,

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
	Perekonomian Provinsi Jambil.			dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Dan empat sektor lainnya termasuk ke dalam sektor ekonomi non basis yaitu sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Dengan menggunakan typologi klassen sektor yang berkembang cepat yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor maju tapi tertinggal yaitu sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor relatif tertinggal yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi.22
Putri Masita (2010)	Analisis Penentuan Potensi Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 1996-2006	Analisis Penentuan Potensi Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 1996-2006	LQ, Shiftshare, dan tipologi klasen	analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1996-2006 Kabupaten Wonosobo mengalami perubahan pola struktur pertumbuhan. Pada tahun 1996, 1998, dan tahun 2000 merupakan daerah dengan klasifikasi daerah berkembang cepat. Sedangkan pada tahun 1997, 1999, 2001 sampai 2006 merupakan daerah relatif tertinggal. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder. Sedangkan sektor basis yang mendukung perekonomian Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1996-2006 adalah sektor pertanian; sektor

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
				pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; sektor angkutan dan komunikasi; dan sektor bank, lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
Dessy Berta Simangunsong (2012)	Analisis Struktur Ekonomi, Sektor Basis, dan Sektor Potensial Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2006-2010	Melihat sektor unggulan dan struktur perekonomian di kota Yogyakarta	Lq, Shiftshare, swot analisis	“” memiliki kesimpulan yaitu berdasarkan analisis LQ menunjukkan bahwa sektor basis yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Hasil analisis SS menunjukkan bahwa sektor kompetitif di kota Yogyakarta adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Berdasarkan analisis MRP pertumbuhan yang menjadi sektor yang potensial adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pemerintah kota Yogyakarta perlu melakukan program pengembangan komunikasi, teknologi informasi serta perbaikan sistem transportasi massal yang sudah tidak layak jalan.

Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
Erlin Agustin (2020)	Analisis strategi pengembangan daerah tertinggal sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi di kabupaten pesisir barat	1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat. 2. Memberikan strategi pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat.	Analisis SWOT	kekuatan utama dari Kabupaten Pesisir Barat adalah wilayah berpotensi besar sebagai pariwisata, kelemahan utama dari Kabupaten Pesisir Barat ditunjukkan oleh faktor strategis kemiskinan masyarakat, faktor yang menjadi peluang utama dari Kabupaten Pesisir Barat adalah Perkembangan teknologi yang pesat, yang menjadi ancaman utama dari Kabupaten Pesisir Barat adalah rawan terjadi ancaman bencana alam.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012 kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Berdasarkan keputusan tersebut kabupaten pesisir barat menjadi daerah otonomi baru yang memisahkan diri dari kabupaten induknya yaitu kabupaten Lampung Barat, sebagai daerah otonomi baru apakah sektor-sektor yang menjadi unggulan dan memiliki potensi investasi serta dapat menjadi sumber dan strategi dalam pembangunan ekonomi daerah.

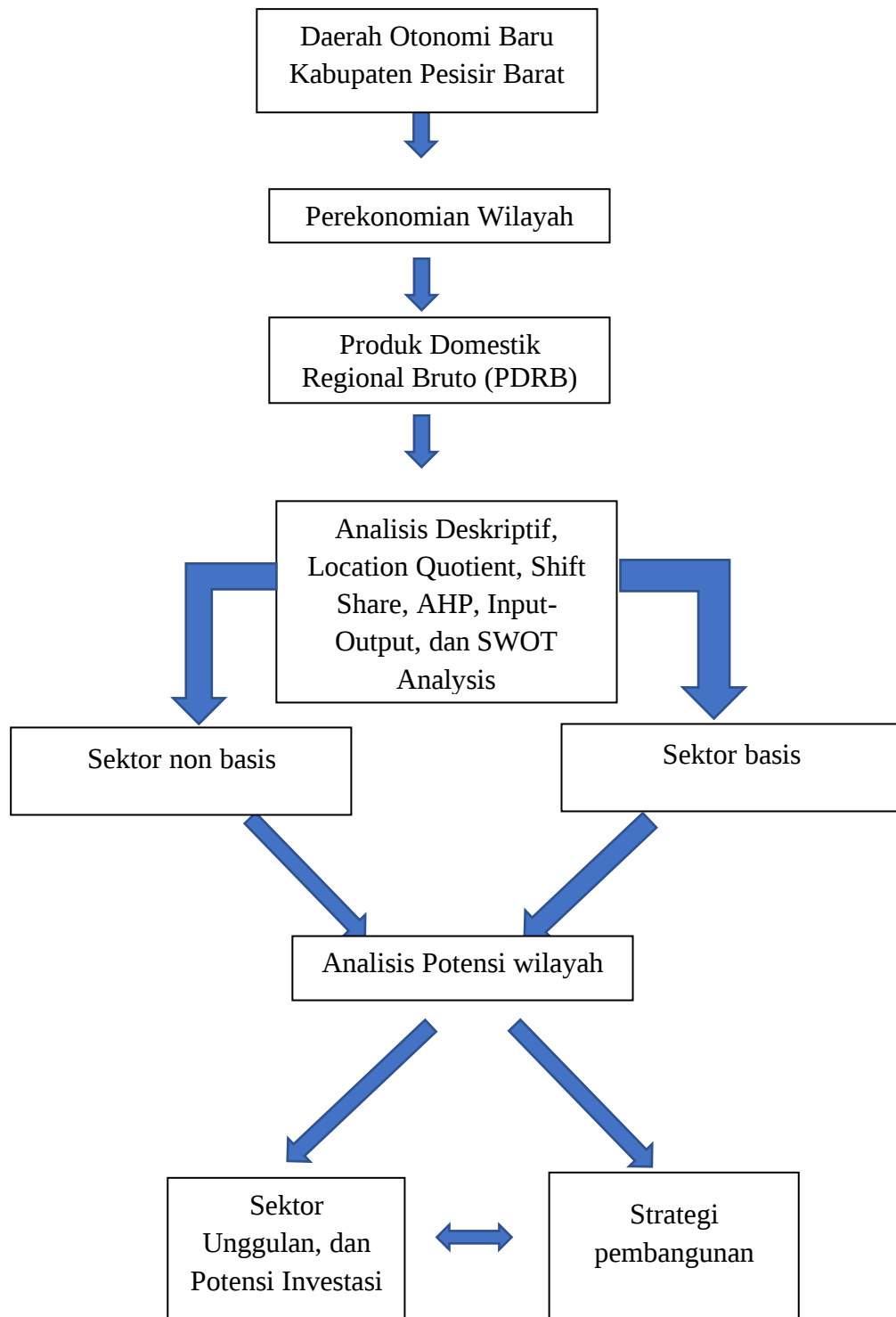
Untuk melakukan identifikasi, maka diperlukan alat analisis yaitu analisis deskriptif . Analisis LQ bertujuan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu membaginya menjadi sektor basis dan sektor non basis. Analisis Shift Share dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Arsyad 1999).

Analisis Input–Output adalah suatu analisis atas perekonomian negara secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di negara tersebut secara keseluruhan.

Analytical Hierarchy Process (AHP) pertama kali dikembangkan oleh Thomas Lorie Saaty dari Wharton Business School pada tahun 1970-an, yang digunakan mencari rangking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan.

Analisis Konsep analisis SWOT memberikan suatu pandangan dasar tentang strategi atau taktik yang diperlukan dalam mencapai tujuan tertentu Berikut Kerangka pemikiran yang sistematis:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pesisir Barat, dengan pengambilan data terkecil berasal dari Kecamatan. Kabupaten Pesisir Barat sebagai Kabupaten terbaru dan satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Lampung sangat perlu diadakannya analisa dan penentuan strategi pembangunan ekonomi. Potensi unggulan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dapat digali dengan menghimpun informasi dari seluruh kecamatan yang ada.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden, meliputi pejabat-pejabat pemerintah daerah, dinas/instansi terkait (sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, Penggalian, perhubungan), BAPPEDA, Asosiasi/Kadinda, dan pada tingkat kecamatan dengan narasumber, koordinator statistik kecamatan, dan camat atau seksi perekonomian kecamatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui "*Indepth Interview*" kepada pejabat instansi/dinas terkait dan pemimpin/pejabat bank pelaksana di daerah untuk mendapatkan penilaian pejabat terkait di tingkat kecamatan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner), untuk memperoleh pendapat narasumber baik dalam rangka menetapkan potensi unggulan Daerah. faktor penghambat dan pendukung serta kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi. Data sekunder, yaitu

data dan informasi yang diperoleh dari dokumen/publikasi/ laporan penelitian dari dinas/instansi dan sumber data lainnya yang menunjang.

3.3.1. Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat yang diwakilkan oleh para ahli, maka penulis menggunakan metode untuk menentukan responden. Metode atau teknik yang digunakan dalam pemilihan responden yaitu dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara sengaja (*purposive sampling*), yaitu menentukan atau memilih responden secara sengaja. Responden dalam penelitian ini adalah seorang ahli (*expert*). Yang dimaksud dengan *expert* di sini tidak harus seseorang yang pakar pada satu bidang keilmuan tertentu, melainkan orang yang mengetahui benar akan permasalahan yang diteliti, hal ini akan memberikan kepercayaan kepada para ahli untuk mengetahui akibat yang akan terjadi (Harinaldi, 2005).

Menurut Suharsimi Arikunto (2009) dalam Manajemen Penelitian Purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya, digunakannya purposive sampling agar narasumber yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan akan informasi yang diperlukan.

Analisis data primer dalam penelitian ini menggunakan alata analisis yaitu analisis hierarki proses (AHP), AHP adalah analisis pakar di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, pada penelitian ini pakar yang ditetapkan dengan pertimbangan (a). Pendidikan, (b). Pengambil kebijakan di Pesisir Barat, (c). Masih berpengaruh di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun responden yang dipilih yaitu dari perwakilan dari setiap masing-masing dinas dan instansi atau lembaga di Kabupaten Pesisir Barat yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini jumlah total responden yang melakukan penilaian/pengisian kuesioner adalah sebanyak 28 responden, Responden pertama adalah pemerintah yang diwakili oleh OPD (dinas-dinas) dan kecamatan serta DPRD komisi 2. Dan untuk responden Non pemerintah diwakili oleh: 1).BPS

2).Bank BNI 3).Bank BRI dan 4) Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Kabupaten Pesisir Barat. Untuk lebih jelas, berikut data responden ahli yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini,

Tabel 3.1. Daftar responden

No	Nama	Jabatan	Unit kerja	Pendidikan
1	Responden 1	Ketua Komisi/Anggota Komisi 2 DPRD	Komisi 2 DPRD Kabupaten Pesisir Barat	S1
2	Responden 2	Kepala Dinas	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan	S2
3	Responden 3	Kepala Dinas	Dinas Ketahanan Pangan	S2
4	Responden 4	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika	S2
5	Responden 5	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	S2
6	Responden 6	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	S2
7	Responden 7	Kepala Dinas	Dinas Pertanian	S2
8	Responden 8	Kepala Dinas	Dinas Perikanan	S2
9	Responden 9	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	S2
10	Responden 10	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	S2
11	Responden 11	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	S2

No	Nama	Jabatan	Unit kerja	Pendidikan
12	Responden 12	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	S2
13	Responden 13	Kepala Bagian	Sekretaria Daerah (Bagian Ekonomi)	S2
14	Responden 14	Camat	Kecamatan Pesisir Tengah	S1
15	Responden 15	Camat	Kecamatan Way Kruai	S1
16	Responden 16	Camat	Kecamatan Pesisir Selatan	S1
17	Responden 17	Camat	Kecamatan Kruai Selatan	S1
18	Responden 18	Camat	Kecamatan Pulaupisang	S1
19	Responden 19	Camat	Kecamatan Ngambur	S1
20	Responden 20	Camat	Kecamatan Ngaras	S1
21	Responden 21	Camat	Kecamatan Bangkumat	S1
22	Responden 22	Camat	Kecamatan Lemong	S1
23	Responden 23	Camat	Kecamatan Pesisir Utara	S1
24	Responden 24	Camat	Kecamatan Karya Penggawa	S1
25	Responden 25	Kepala Badan	Badan Pusat Statistik Daerah	S2
26	Responden 26	Manajer	Bank BNI	S1
27	Responden 27	Manajer	Bank BRI	S1
28	Responden 28	Ketua	PHRI Pesisir Barat	S1

3.2. Definisi Operasional

Defenisi operasional digunakan untuk menyamakan pemahaman tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran. Definisi operasional Penelitian ini adalah:

3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yaitu jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi sebagai unit produksi di dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dalam penelitian ini data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi sebagai unit produksi di dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu, dinilai dengan harga tahun dasar.

3.2.2. Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi adalah keseluruhan lapangan usaha dalam unit produksi sebagai pembentuk PDRB, unit produksi itu terdiri dari 17 sektor, yaitu: pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3) sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; (7) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (8) sektor transportasi dan pergudangan; (9) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; (10) informasi dan komunikasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) real estate; (13) jasa perusahaan; (14) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; (15) jasa pendidikan; (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; (17) jasa lainnya. Sub sektor ekonomi adalah, sub sektor dari masing-masing struktur perekonomian yang disebutkan diatas

3.2.3. Kriteria Sektor pilihan

Untuk melihan persepsi masyarakat dalam pembangunan perokonmian, maka terdapat beberapa kriteria yang menjadi alasan masyarakat dalam memilih suatu sektor yang

menurut mereka harus diutamakan dalam proses pengembangannya. Kriteria-kriteria tersebut adalah :

1. Sosial Budaya
2. Tenaga Kerja Terampil yang dibutuhkan
3. Kemudahan Mengelola (*Managing*) usaha
4. Penyerapan Tenaga Kerja
5. Sumbangan terhadap perekonomian
6. Ketersediaan Bahan Baku
7. Teknologi
8. Sarana Produksi/ Usaha
9. Harga
10. Ketersediaan Pasar
11. Modal

3.3. Metode Analisis

Dalam penelitian ini untuk menjawab tujuan penelitian nomor 1 yaitu Identifikasi, dan analisa sektor basis ekonomi yang unggulan dan Kompetitif di Kabupaten Pesisir Barat; serta persepsi para ahli di Kabupaten Pesisir Barat terhadap sektor perekonomian yang peting dan potensial., maka digunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk melihat keunggulan sektoral dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau wilayah studi dengan wilayah referensi. Alat analisis ini dipakai untuk mengetahui sektor basis dan non basis di suatu wilayah. Analisis LQ dilakukan dengan membandingkan distribusi prosentase masing- masing sektor di masing-masing wilayah kabupaten atau kota dengan provinsi. (Lincoln Arsyad, 1999).

2. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi.

3. Analisis Overlay.

Analisis Overlay disajikan dengan mengintegrasikan hasil-hasil analisis terhadap sektor unggulan daerah yang telah disajikan pada sub bab-sub bab sebelumnya. Tujuan dari analisis overlay ini adalah untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria kontribusi (analisis LQ) dan kriteria pertumbuhan (analisis SS) yang diwakili oleh komponen Differential Shift (Dr) .

4. Analisis Input Putput (I-O)

Analisis Input–Output adalah suatu analisis atas perekonomian negara secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di negara tersebut secara keseluruhan. Misalnya setiap produk pasti membutuhkan input agar produk itu dapat dihasilkan. Hasil produk dapat langsung dikonsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain atau input untuk produk yang sama pada putaran berikutnya. Hal itu menggambarkan bahwa sektor- sektor dalam perekonomian Negara saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Kaitan itu bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk melihat keterkaitan ini digunakan Metode Analisis Input–Output. Prof. Leontif (1930) memperkenalkan Tabel Input–Output (Tabel I–O) beserta analisisnya. Tabel I– O adalah alat yang ampuh untuk menganalisis perekonomian wilayah (daerah) dan sangat berguna dalam perencanaan pembangunan suatu daerah.

5. Analytical Hierarchy Process (AHP).

AHP adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thimas L. Saaty. Ciri analisis ini adalah menggunakan hirarki yang menguraikan permasalahan dalam satu kesatuan menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana. Hierarki pada analisis ini dibagi menjadi goal, skenario, sasaran, dan strategi. AHP

merupakan teknik pengambilan keputusan secara matematis dengan mempertimbangkan aspek kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, faktor yang diperhatikan dalam metode AHP yaitu faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. (Bambang Permadi, 1992). AHP dalam penelitian ini digunakan untuk melihat keputusan masyarakat terhadap sektor perekonomian mana yang ingin di prioritaskan dalam pembangunan, berdasarkan kriteria yang ada.

Tujuan kedua dalam penelitian ini yaitu Strategi pembangunan kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada persepsi Para ahli di Kabupaten Pesisir Barat dan hasil analisa sektor unggulan akan dijawab dengan Swot analysis

1. Analisis SWOT

Strength, Weakness, Opportunities, Threats adalah kepanjangan dari SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Robinson dan Pearce (1997). Dalam proses perumusan strategi yang jitu, SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

3.4. Prosedur Analisis data

3.4.1. Analisis Location Quotient

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk melihat keunggulan sektoral dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau wilayah studi dengan wilayah referensi. LQ merupakan suatu perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar (Tarigan, 2014). Adapun cara menghitung LQ adalah :

Rumus yang dipakai untuk menghitung LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\left(\frac{X_{ir}}{X_r}\right)}{\left(\frac{X_{in}}{X_n}\right)}$$

Keterangan:

1. X_{ir} adalah suatu sektor i di tingkat daerah
2. X_r adalah jumlah seluruh sektor di tingkat daerah
3. X_{in} adalah suatu sektor i di tingkat nasional
4. X_n adalah jumlah seluruh sektor di tingkat nasional

Adapun hasil dari perhitungan LQ dapat diartikan sebagai berikut :

1. $LQ > 1$, mengindikasikan dilakukannya ekspor produk pada sektor tersebut, ekspor dilakukan karena adanya surplus. (peranan sektor lebih besar di daerah daripada nasional)
2. $LQ < 1$, mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. (peranan sektor lebih kecil di daerah daripada nasional)
3. $LQ = 1$, mengindikasikan bahwa adanya produktivitas berimbang yang berarti sektor ini masih belum layak untuk diekspor. (peranan sektor sama baik di daerah ataupun secara nasional)

Setelah terdapat hasil dari sekto-sektor unggulan yang ada berdasarkan pada data PDRB kabupaten Pesisir Barat, Maka *Analisis Location Quotient* selanjutnya dilakukan untuk melihat subsektor dari masing-masing sektor unggulan tersebut, manakah subsektor yang menjadi unggulan dari sektor-sektor unggulan tersebut.

Berdasarkan daya yang telah penulis kumpulkan untuk melakukan analisis *Analisis Location Quotient* pada subsektor, hanya sektor sekot berikut yang memiliki data sampai pada subsektor, sektor tersebut adalah :

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

2. Sektor pada Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5. Sektor Transportasi dan Pergudangan
6. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Sementara untuk sektor-sektor berikut, tidak memiliki data sampai pada subsektor

1. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
2. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3. Sektor Konstruksi
4. Sektor Informasi dan Komunikasi
5. Sektor Real Estate
6. Sektor Jasa Perusahaan
7. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
8. Sektor Jasa Pendidikan
9. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
10. Sektor Jasa lainnya

3.4.2. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share (SS) digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran dan peranan sektor perekonomian di suatu daerah. Analisis ini merupakan teknik yang berguna dalam menganalisa perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja perekonomian daerah yang relatif lebih besar serta menentukan sektor-sektor yang berkembang di suatu daerah.

Secara klasik, analisis shift-share membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel di wilayah seperti PDRB, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh- pengaruh: pertumbuhan nasional (N), pertumbuhan proporsional (M) dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*share*), pengaruh pertumbuhan

proporsional disebut *proportional shift* dan pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan *differential shift* atau *regional share*.

Untuk sektor i di suatu wilayah:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Bila analisis tersebut diterapkan kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Y , maka

$$D_{ij} = Y^*_{ij} - Y_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot R_n \dots\dots\dots (3)$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n) \dots\dots\dots (4)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (5)$$

di mana:

r_{ij} , r_{in} dan r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah provinsi dan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = (Y^*_{ij} - Y_{ij}) / Y_{ij} \dots\dots\dots (6)$$

$$r_{in} = (Y^*_{in} - Y_{in}) / Y_{in} \dots\dots\dots (7)$$

$$r_n = (Y^*_n - Y_n) / Y_n \dots\dots\dots (8)$$

Y_{ij} = PDRB sektor i di wilayah lebih rendah,

Y_{in} = PDRB sektor i di tingkat lebih tinggi,

Y_n = PDRB di tingkat nasional, semuanya diukur pada suatu tahun dasar.

*Superscript ** menunjukkan PDRB pada tahun analisis.

Untuk wilayah Sultra, pertumbuhan Wilayah (3), pertumbuhan proporsional (4) dan keunggulan kompetitif (5) dapat ditentukan untuk sektor i atau dijumlah untuk semua sektor dalam keseluruhan wilayah.

Persamaan *shift-share* untuk sektor i di Suatu Wilayah adalah:

$$D_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n + Y_{ij} (r_{in} - r_n) + Y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad (9)$$

Kriteria penilaian:

Jika $M_{ij} > 0$ maka pertumbuhan sektor i cepat pada wilayah Provinsi

Jika $M_{ij} < 0$ maka pertumbuhan sektor i lambat pada wilayah Provinsi

Jika $C_{ij} > 0$ berarti sektor/wilayah j mempunyai daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor/wilayah provinsi lainnya untuk sektor i

Jika $C_{ij} < 0$ berarti sektor i pada wilayah provinsi tidak dapat bersaing dengan baik dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya

Berdasarkan daya yang telah penulis kumpulkan untuk melakukan analisis *Shift Share* pada subsektor, hanya sektor-sektor berikut yang memiliki data sampai pada subsektor, sektor tersebut adalah :

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Sektor pada Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5. Sektor Transportasi dan Pergudangan
6. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Sementara untuk sektor-sektor berikut, tidak memiliki data sampai pada subsektor

1. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
2. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3. Sektor Konstruksi
4. Sektor Informasi dan Komunikasi
5. Sektor Real Estate
6. Sektor Jasa Perusahaan
7. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
8. Sektor Jasa Pendidikan
9. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
10. Sektor Jasa lainnya

3.4.3. Analisis Overlay

Analisis Overlay disajikan dengan mengintegrasikan hasil-hasil analisis terhadap sektor unggulan daerah yang telah disajikan pada sub bab-sub bab sebelumnya. Tujuan dari analisis overlay ini adalah untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria kontribusi (analisis LQ) dan kriteria pertumbuhan (analisis SS) yang diwakili oleh komponen Differential Shift (Dr) .

3.4.4. Analisis Input-Output

Dalam Metode Input–Output, sebagai tabel dasarnya adalah tabel transaksi yang terdiri dari: tabel koefisien input (matriks koefisien), tabel pengganda, tabel indeks daya menarik dan indeks daya mendorong serta tabel pendukung dan tabel analisis lainnya tergantung kepada luasnya bidang yang hendak dibahas. Format tabel transaksi yang lengkap seperti berikut ini:

Tabel 3.2. Struktur dasar dari Tabel I-O

Output Input			Internal Wilayah									Eksternal Wilayah	Output Total
			Sektor Produksi dalam wilayah (permintaan antara)						Permintaan akhir dalam wilayah				
			1	2	...	j	...	n	C	G	I		
Internal Wilayah	Sektor pproduksi dalam wilayah (input antara)	1	X_{11}		...	X_{1j}	...	X_{1n}	C_1	G_1	I_1	E_1	X_1
		2	X_2			X_{2j}		X_{2n}	C_2	G_2	I_2	E_2	X_2
		:											
		i	...	...		X_{ij}	...	...	C_i	G_I	I_i	E_i	X_i
		:											
		:											
		n	X_{n1}					X_{nn}	C_n	G_n	I_n	E_n	X_n
	Input primer (nilai tambah)	W	W_1			W_j		W_n	C_W	G_W	I_W	E_W	W
		T	T_1			T_j		T_n	C_T	G_T	I_T	E_T	T
		V	V_1			V_j		V_n	C_V	G_V	I_V	E_V	V
M		M_1			M_j		M_n	C_M	G_M	I_M	-	M	
Total Input			X_1			X_1		n	C	G	I	E	X

Keterangan :

i, j : sektor ekonomi

X_{ij} : banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input sektor j

Y_i : total permintaan akhir sektor i

X_j : total input sektor j

C_i : konsumsi rumah tangga terhadap sektor i

G_i : konsumsi pemerintah terhadap sektor i

I_i : pembentukan modal tetap (investasi) di sektor i , output sektor i yang menjadi barang modal

E_i : ekspor barang dan jasa sektor i

C_j : pendapatan (upah dan gaji) rumah tangga dari sektor j

G_j : pendapatan pemerintah dari sektor j

I_j : surplus usaha sektor j M_j : Impor sektor j

Secara lebih sederhana tabel diatas pada dasarnya terbagi atas empat kuadran sebagai berikut:

	Permintaan	Permintaan akhir (Y_i)	X_i
Input antara	<i>Kuadran I</i>	<i>Kuadran II</i>	
Nilai Tambah	<i>Kuadran III</i>	<i>Kuadran IV</i>	

Kuadran I merupakan gambaran transaksi antar sektor dalam proses produksi, Kuadran II menunjukkan matriks permintaan akhir terhadap output masing-masing sektor, Kuadran III menunjukkan matriks nilai tambah (*value added*) masing-masing sektor faktor produksi (kecuali impor) dan Kuadran IV merupakan transfer nilai tambah antar institusi. Berdasar tabel I-O terlihat jelas bahwa baris merepresentasikan distribusi penjualan output suatu sektor tertentu ke sektor lain. Sedangkan kolom/lajur mempresentasikan distribusi pembelian sektor tertentu pada sektor lainnya. Tabel I-O disusun berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (1) Homogenitas: tiap komoditi di supply oleh suatu industri secara

tunggal/sektor produksi dan tak ada substitusi output antar sektor

- (2) Prinsip linieritas/proporsionalitas: input-input yang yang dibeli oleh tiap sektor (fungsi tingkat output sektor tersebut)
- (3) Prinsip additivitas: efek tabel pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah
- (4) Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa nilai I-O kabupaten Pesisir Barat sama dengan I-O Provinsi Lampung

Dalam analisis input output terdapat indeks daya penyebaran. Indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan merupakan lanjutan dari matrik pengganda (*matrik inverse*). Nilai Indeks daya penyebaran dapat pula dikatakan sebagai nilai indeks keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) sedangkan indeks derajat kepekaan dapat pula disebut indeks keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Berdasarkan perhitungan dari indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan didapatkan hasil perhitungan yang terbagi kedalam empat (4) kelompok, yaitu :

- a. Kelompok pertama merupakan sektor dengan karakteristik indeks daya penyebaran atau backward linkages index dan derajat kepekaan atau forward linkages index > 1 ,
- b. Kelompok ke dua adalah sektor dengan nilai indeks daya penyebaran backward linkages index < 1 dan indeks derajat kepekaan atau forward linkages index > 1 .
- c. Kelompok ke tiga berisikan sektor dengan nilai indeks daya penyebaranbackward linkages index dan derajat kepekaan atau forward linkages index < 1 .
- d. Kelompok ke empat merupakan sektor yang memiliki nilai indeks daya penyebaran backward linkages index > 1 sedangkan nilai indeks derajat kepekaanatau forward linkages index < 1 .

Analisa Indeks Backward Linkages dan Indeks Forward Linkages dapat memberikan gambaran mengenai kinerja dari masing-masing sektor dalam tabel input-output terhadap perekonomian wilayah. Untuk nilai indeks daya penyebaran

dan derajat kepekaan yang berada > 1 , ini berarti bahwa sektor tersebut memiliki kinerja diatas rata-rata dari total seluruh perekonomian di wilayah tersebut dan begitupula sebaliknya jika berada < 1 maka kinerjanya di bawah nilai rata rata dari total seluruh perekonomiannya.

3.4.5. Analisis Hirarki Proses

Analytical Hierarchy Process (AHP) pertama kali dikembangkan oleh Thomas Lorie Saaty dari Wharton Business School pada tahun 1970-an, yang digunakan mencari rangking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan.

AHP adalah suatu metoda yang sederhana dan fleksibel yang menampung kreativitas dalamancangannya terhadap suatu masalah (dibuat sesuai dengan masing-masing pemakai). Kekuatan AHP terletak pada struktur hierarkinya sendiri yang memungkinkan seseorang memasukkan semua faktor penting, dan mengaturnya dari atas ke bawah mulai dengan yang paling penting ke tingkat yang berisi alternatif, untuk dipilih mana yang terbaik. (Saaty, 1993).

Kelebihan AHP ini adalah kemampuannya jika dihadapkan pada situasi yang kompleks atau berkerangka dimana data informasi statistik dari masalah yang dihadapi sedikit. Data yang ada hanya bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, pengalaman atau intuisi. Jadi, masalah tersebut dapat dirasakan dan diamati namun kelengkapan data numerik tidak menunjang untuk dimodelkan secara kuantitatif. (Suyono dan Mukti, 2009).

1. Aksioma Saaty

Ada beberapa landasan aksiomatik dalam metode PHA yang terdiri dari :

- *Reciprocal comparison*, artinya matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah k kali lebih penting dari pada B maka B adalah $1/k$ lebih penting dari pada A.
- *Homogeneity*, artinya kesamaan dalam melakukan perbandingan.

Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan semangka dengan bola basket dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.

- *Dependence*, artinya setiap level mempunyai kaitan (complete hierarchy) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (incomplete hierarchy).
- *Expectation*, artinya menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

2. Langkah-Langkah Proses Hierarki Analitik

Secara umum, pengambilan keputusan dengan metode PHA didasarkan pada langkah-langkah berikut :

- a. Mendefinisikan persoalan/masalah dan merinci pemecahan/solusi yang diinginkan.
- b. Membuat struktur hierarki dari tingkat puncak sampai ke tingkat di mana dimungkinkan campur tangan untuk memecahkan persoalan
- c. Membuat sebuah matriks perbandingan berpasangan untuk kontribusi atau pengaruh setiap elemen yang relevan terhadap setiap kriteria yang berada setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
- d. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks dengan nilai total dari setiap kolom.
- e. Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai *eigen vector* yang dimaksud adalah nilai *eigen vector* maksimum yang diperoleh dengan perhitungan manual.
- f. Mengulangi langkah c, d, dan e untuk seluruh tingkat hierarki.
- g. Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot setiap elemen.

Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan.

- h. Menguji konsistensi hierarki. Jika tidak memenuhi syarat dengan nilai $CR < 0,100$; maka penilaian harus diulang kembali.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Proses Hierarki Analitik

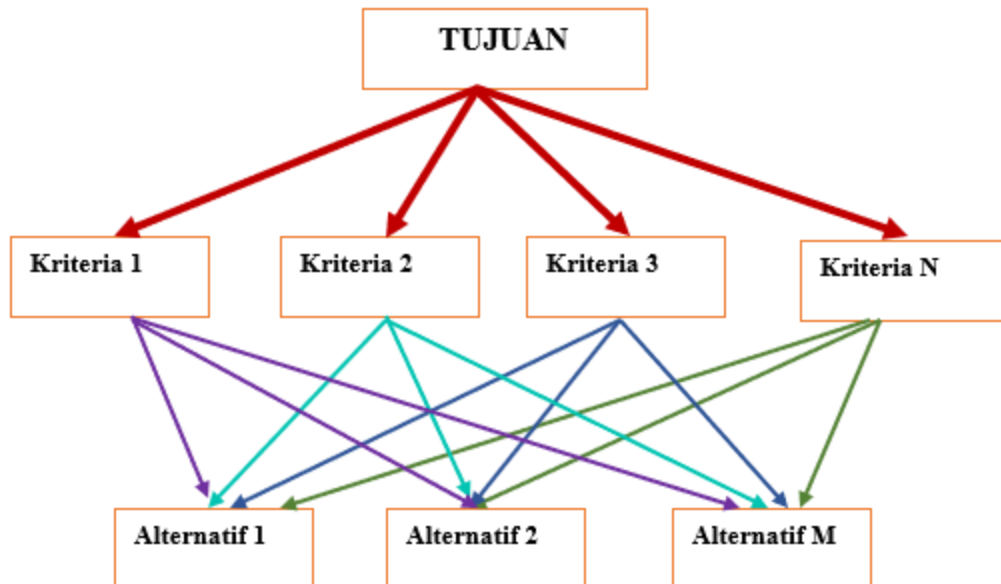
Dalam memecahkan persoalan, metode PHA didasarkan pada beberapa prinsip dasar yaitu :

- Dekomposisi (*Decomposition*)

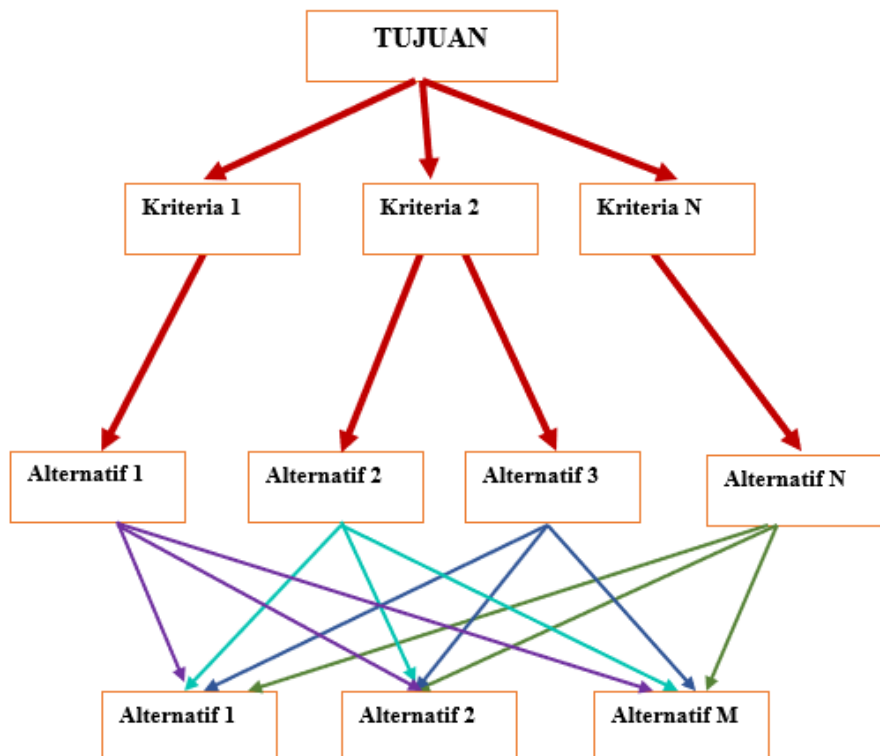
Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan *decomposition* yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsur sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini, maka proses analisis ini dinamakan hierarki (*hierarchy*). Ada dua jenis hierarki, yaitu lengkap dan tak lengkap. Dalam hierarki lengkap, semua elemen pada suatu tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya (lihat gambar 3.1 dan 3.2). Jika tidak demikian, dinamakan hierarki tak lengkap. Bentuk struktur dekomposisi yakni :

Tingkat pertama	: Tujuan keputusan (<i>Goal</i>)
Tingkat kedua	: Kriteria-kriteria
Tingkat ketiga	: Alternatif-alternatif

Gambar 3.1. Struktur hierarki lengkap



Gambar 3.2. Struktur hierarki tak lengkap



- Penilaian Perbandingan (*Comparative Judgement*)

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan tampak lebih mudah bila disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison yaitu matriks perbandingan berpasangan memuat preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria.

- Sintesis Prioritas (*Synthesis of Priority*)

Synthesis of Priority dilakukan dengan menggunakan eigen vector method untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan.

- Konsistensi Logis (*Logical Consistency*)

Logical Consistency berarti dua hal. Pertama, pemikiran/objek yang serupa dikelompokkan menurut homogenitas dan relevansinya. Misalnya, anggur dan kelereng dapat dikelompokkan dalam satu set homogen jika kriterianya adalah bulat, tetapi tidak dapat jika kriterianya adalah rasa. Kedua, tingkat hubungan antara gagasan/objek yang didasarkan pada suatu kriteria tertentu. Misalnya, jika manis merupakan kriteria dan madu dinilai 5 kali lebih manis dibanding gula, dan gula 2 kali lebih manis dibanding sirop, maka seharusnya madu dinilai manis 10 kali lebih manis dibanding sirop. Jika madu hanya dinilai 4 kali manisnya dibanding sirop, maka penilaian tak konsisten dan proses harus diulang jika ingin memperoleh penilaian yang lebih tepat.

4. Penyusunan Prioritas

Penyusunan prioritas adalah dengan membuat perbandingan berpasangan terhadap suatu kriteria yang ditentukan. Perbandingan tersebut ditransformasikan dalam bentuk matriks yang dikenal dengan matriks

perbandingan (pairwise comparison). Contoh, terdapat n objek yang dinotasikan dengan $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ yang akan dinilai berdasarkan pada tingkat kepentingannya antara lain A_i dan A_j .

Matriks Perbandingan Berpasangan

C	A_1	A_2		A_n
A_1	a_{11}	a_{12}		a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}		a_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
A_n	a_{n1}	a_{n2}		a_{nn}

Nilai a_{11} adalah nilai perbandingan elemen A_1 (baris) terhadap A_1 (kolom) yang menyatakan hubungan

- Seberapa jauh tingkat kepentingan A_1 (baris) terhadap kriteria C dibandingkan dengan A_1 (kolom) atau
- Seberapa jauh dominasi A_1 (baris) terhadap A_1 (kolom) atau
- Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada A_1 (baris) dibandingkan dengan A_1 (kolom).

Bentuk matriks ini simetri atau persegi, dimana diagonal utama dari matriks tersebut adalah satu karena yang diperbandingkan adalah dua elemen yang sama. Sedangkan elemen yang diluar diagonal utama berupa matriks reciprocal.

3.4.6. Analisis SWOT

1. Matriks IFE dan Matriks EFE

Matriks IFE digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama yang dihadapi, sedangkan matriks EFE digunakan untuk pengambilan keputusan dalam meringkas dan mengevaluasi semua informasi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman (Umar, 2001).

a) Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

Langkah-langkah dalam matriks IFE adalah sebagai berikut :

- Buatlah daftar faktor-faktor sukses kritis untuk aspek internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses).
- Tentukan bobot (weight) untuk masing-masing faktor eksternal dengan skala mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai dengan 1,0 (sangat penting), Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Untuk menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2 dan 3 (Kinner, dalam Nurjanah, 2006)

Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah:

1= Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal.

2= Jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal.

3= Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal.

Tabel 3.3. Pembobotan Faktor Internal

Faktor Strategi Internal	A	B	C	D	...	Total	Bobot
A							
B							
C							
D							
...							
Total							

Nilai bobot dari masing-masing variabel ini dihitung berdasarkan rumus, dengan menentukan nilai setiap variabel nilai keseluruhan variabel.

$$A_i = \frac{X_i}{\sum X_i}$$

$$I = 1$$

Keterangan :

a_i = Bobot variabel ke-i

X_i = Nilai variabel ke i

$$I = 1, 2, 3, \dots, n$$

n = Jumlah variable

Sumber: Nurjanah, 2006

- c. Beri rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang memiliki nilai :
- 1 = kelemahan utama/mayor,
 - 2 = kelemahan kecil/minor,
 - 3 = kekuatan kecil/minor
 - 4 = kekuatan besar/mayor.
- d. Kalikan antara bobot dan rating dari masing masing faktor untuk menentukan nilai skornya.
- e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi wilayah yang dinilai. Nilai rata rata adalah 2,5. Jika nilainya dibawah 2,5 menandakan secara internal, wilayah lemah, sedangkan nilai yang berada di atas 2,5 menunjukan posisi internal yang kuat.

Tabel 3.4. Internal Factor Evaluation (IFE)

Faktor Internal Strategis	Bobot (x)	Peringkat (y)	Nilai Tertimbang (x)(y)
Kekuatan			
1.			
2.			
...			
Kelemahan			
1.			
2.			
...			
Jumlah Nilai	1,00		

Sumber: (Whelen dan Hunger, (dalam Solihin, 2012)

b) Matriks External Factor Evaluation (EFE)

Pada prinsipnya, tahapan kerja pada matriks EFE sama dengan matriks IFE. Langkah-langkah dalam matriks EFE adalah sebagai berikut :

- a. Buatlah daftar faktor-faktor sukses kritis untuk aspek internal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).
- b. Tentukan bobot (weight) untuk masing-masing faktor eksternal dengan skala mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai dengan 1,0 (sangat penting), Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Pemberian bobot ini berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis wilayah dalam suatu daerah

tertentu. Untuk menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2 dan 3 (Kinner, 1991 dalam Nurjanah, 2006). Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah:

1= Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal.

2= Jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal.

3= Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal

Tabel 3.5. Pembobotan Faktor Eksternal

Faktor Strategi Eksternal	A	B	C	D	...	Total	Bobot
A							
B							
C							
D							
...							
Total							

Nilai bobot dari masing-masing variabel ini dihitung berdasarkan rumus, dengan menentukan nilai setiap variabel nilai keseluruhan variabel.

$$A_i = \frac{X_i}{\sum n X_i}$$

$$I = 1$$

Keterangan :

a_i = Bobot variabel ke-i

X_i = Nilai variabel ke i

$$I = 1,2,3...n$$

n = Jumlah variable

Sumber : Nurjanah, 2006

- c. Beri rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang memiliki nilai :

1 = kelemahan utama/mayor,

2 = kelemahan kecil/minor,

3 = kekuatan kecil/minor

4 = kekuatan besar/mayor

- d. Kalikan antara bobot dan rating dari masing masing faktor untuk mendapatkan skor semua faktor-faktor sukses kritis.
- e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total. Skor total 4,0 mengindikasikan bahwa wilayah merespons dengan cara yang luar biasa terhadap peluang-peluang yang ada dan menghindari ancaman-ancaman. Sementara itu, skor total sebesar 1,0 menunjukkan bahwa wilayah tidak memanfaatkan peluang-peluang yang ada atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal.

Tabel 3.6. External Factor Evaluation (EFE)

Faktor Eksternal Strategis	Bobot (x)	Peringkat (y)	Nilai Tertimbang (x)(y)
Kekuatan			
1.			
2.			
...			
Kelemahan			
1.			
2.			
...			
Jumlah Nilai	1,00		

Sumber: (Whelen dan Hunger, (dalam Solihin, 2012)

2. Matriks SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)

Konsep analisis SWOT memberikan suatu pandangan dasar tentang strategi atau taktik yang diperlukan dalam mencapai tujuan tertentu. Analisis SWOT mengkaji dengan menilai faktor-faktor terkait. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*).

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan, strategi dan kebijakan wilayah. Dengan demikian perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT (Rangkuti, 2001)

Untuk merumuskan strategi, maka dilakukan interaksi kombinasi dari strategi yang meliputi kombinasi internal-eksternal, yang terdiri dari:

1. Strategi *Strength-Opportunity* (SO); Interaksi kombinasi strategi SO: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi *Strength-Threat* (ST); Interaksi kombinasi strategi ST: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
3. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO); Interaksi kombinasi strategi WO: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
4. Strategi *Weakness-Threat* (WT) Interaksi kombinasi strategi WT: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman. Matriks SWOT dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7. Matriks SWOT ANALYSIS

Indikator Internal Faktor Eksternal	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
	<i>STRATEGI (SO).</i>	<i>STRATEGI (WO).</i>
<i>Opportunities (O)</i>	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Ciptakan strategi yang Meminimalkan kelemahan Untuk memanfaatkan peluang.
<i>Threats (T)</i>	<i>STRATEGI (ST).</i> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	<i>Strategi (WT).</i> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Sumber : David, 2002

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, telah teridentifikasi, sektor basis ekonomi yang memiliki potensi unggulan di Daerah Kabupaten Pesisir Barat. sektor yang menjadi sektor penting dan unggulan dengan nilai $LQ > 1$ dan Nilai Shift Share > 0 (nilai *Differential Shift* Kompetitif) dan juga nilai BL dan FL analisa Input output > 1 adalah 1). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2). Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 4) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 5) Jasa Pendidikan, 6). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kemudian subsektor yang harus di fokuskan dalam pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah Padi, Sapi, Pengolahan Ikan, Rumah Makan, Damar, Penyewaan (Hotel, Cottage), AKDP, Cabe, Pisang, Tangkap laut, Wisata Pantai/laut, Jagung, Ayam Potong, Keripik, Toko Pertanian, Lada, Tourguide (Pariwisata), Bus, Tomat, Durian, Tangkap air tawar, Wisata Kuliner, Kacang Kedelai, Kerbau, Tahu/Tempe, Pedagang Hasil Pertanian, Kopi Robusta, Agen Perjalanan, Angkutan Barang, Terong, Mangga, Budidaya air tawar, Wisata Religi. Subsektor ini merupakan subsektor unggulan dan yang menjadi input serta output dalam sektor unggulan berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

Strategi Pembangunan Kabupaten Pesisir barat berdasarkan pada persepsi Para ahli di Kabupaten Pesisir Barat dan hasil analisa sektor unggulan adalah dengan :

- a. Memanfaatkan dampak sebagai daerah otonomi baru
- b. Optimasi sekto-sektor unggulan daerah
- c. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang dapat penulis berikan untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten pesisir adalah:

1. Menjadikan sektor unggulan sebagai sektor utama untuk di kembangkan dalam menunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan pada penelitian ini terdapat sektor-sektor yang unggulan dan kompetitif di tingkat provinsi sektor tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
2. Untuk memperhatikan sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu, berdasarkan penelitian sektor ini merupakan sektor unggulan dan kompetitif, namun perlu di berikan perlakuan dan pengawasan khusus, agar tidak terjadi permasalahan di sektor ini.
3. Memperbaiki kelemahan yang ada dikabupaten Pesisir Barat, berdasarkan persepsi para ahli, modal merupakan kriteria utama untuk sektor unggulan, namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat bahwa investasi di Kabupaten Pesisir Barat tidak efisien, dengan dibuktikan oleh nilai Incremental Output Rasio (ICOR), Selanjutnya adalah sektor SDM Penduduk Kabupaten Pesisir Barat, karena berdasar data yang ada menunjukkan rendahnya SDM di Kabupaten Pesisir Barat.
4. Sektor yang menjadi sektor non basi dan tidak unggulan agar tetap di perhatikan, sehingga dapat menambah dan menjadikan sektor non basisi sebagai sektor basis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Absyari, N. H. (2020). Analisis penentuan komoditas unggulan sektor pertanian dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2017 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Achmad, Z. (2018). Determination of economic sector in East Kalimantan, Indonesia. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, 11(3), 182–201. <https://doi.org/10.1108/jcefts-01-2018-0001>
- Ahmadi Esfahani, N., & Shahandashti, M. (2020). Post-hazard labor wage fluctuations: a comparative empirical analysis among different sub-sectors of the U.S. construction sector. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 25(3), 313–330. <https://doi.org/10.1108/JFMPC-07-2019-0063>
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi).
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*.
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*. Tersedia secara online di: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf> [diakses di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018].
- Arsyad, M., & Kawamura, Y. (2010). Reducing poverty of cocoa smallholders in Indonesia: is agricultural economic activity still the pioneer?. *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 58(2), 217.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1994 : *Perencanaan Pembangunan*
- Boediono, D. (1985). *Ekonomi Moneter*, Edisi 3.
- Chohiri, A. N. (2009). Analisis perubahan struktur ekonomi dan identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Cilacap pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Deddy Supriady Bratakusuma, 2000 : *Pembangunan Daerah dan Perspektif*
- Elmore dalam Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI. Hal 43 8 *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*
- Fitria, T., Ferawati, R., & Mutia, A. (2019). *Pengaruh Modal Usaha Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Kerajinan Tangan Tas Rajut Di Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir* (Doctoral dissertation, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI).
- Freeman, A., & Freeman, J. I. (2008). John Payne Collier. Yale University Press.
- GINANJAR ADISASMITA, 1997 : *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*, LP3ES.
- Glasson, J., & Marshall, T. (2007). *Regional planning*. Routledge.
- Haji Masagung, *Pembangunan, Perkembangan Teori dan Praktek*, LP3ES
- Harahap Sofyan, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),
- Harinaldi, D. I., & Eng, M. (2005). *Prinsip-prinsip statistik untuk teknik dan sains*. Jakarta: Erlangga.
- Idrus, M., Samang, L., Adisasmita, R., Sitepu, G., & Ramli, M. I. (2012). A Study on the Container Yard Utilization of the Major Ports in Indonesia Eastern Region. *International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS*, 12(03), 96-100.

- INTERVIEW, M. (1998). An interview with Wassily Leontief. *Macroeconomic Dynamics*, 2, 116-140.
- Irawan, T. (2014). ICT and economic development: comparing ASEAN member states. *International Economics and Economic Policy*, 11(1), 97-114.
- Sadono Sukirno (1985:13)
- Iskandar Kato, Ahmad Faridi, Erika Revida, etall, dalam *Manajemen Pembangunan Daerah* 21-30:2021
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kunarjo, 1993 : *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lincoln Arsyad, 1999 : *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*
- Lincoln arsyad. 2010. *Pengantar perencanaan pembangunan ekonomi daerah* (edisi kedua). Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. h. 108).
- Lothar Gundling, 1980, *Public Participation in Enviromental Decision*
- Luxhoj, J. T. (1991). A Methodology for the Location of Facility Ingress/Egress Points. *International Journal of Operations & Production Management*, 11(5), 6–21. <https://doi.org/10.1108/01443579110001608>
- Moeljarto Tjokrowinoto, *Politik Pembangunan*, Op.Cit. halaman 42-53 1987
- Mudrajat, K. (2003). *Research Methods for Business and Economics*. Jakarta: Erlangga.
- Myrdal, G., & Sitohang, P. (1957). *Economic theory and under-developed regions*. Hirschman (1958)
- Noor, S. (2014). Penerapan analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran Daihatsu Luxio di Malang. *Jurnal Intekna*, 14(2), 102-209.
- Nugroho J. Setiadi, *Business Economics And Managerial Decision Making*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Orford, J., Cass, D. T., & Glasson, M. J. (2004). Advances in the treatment of oesophageal atresia over three decades: the 1970s and the 1990s. *Pediatric surgery international*, 20(6), 402-407.
- Palayukan, R. O., & Adisasmita, S. A. (2018). *Analisis Pemilihan Trase Jalur Kereta Api*.
- Payne, G. (2017). G Payne.
- Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2025
- Permadi, B. (1992). *Analysis Hierarchy Process*. Jakarta. PAU EK Universitas Indonesia.
- Rachbini, D. (2001). *Pembangunan Ekonomi dan SDM*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rachbini, D. J. (2001). *Ekonomi di era transisi demokrasi*.
- Resbeut, M., & Gugler, P. (2016). Impact of clusters on regional economic performance. *Competitiveness Review*, 26(2), 188–209. <https://doi.org/10.1108/cr-09-2015-0078>
- Riswan, R., Suyono, E., & Mafudi, M. (2017). *Revitalization model for village unit cooperative in Indonesia*.

- Riyadi, S. (2011). Pengaruh kompensasi finansial, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan manufaktur di Jawa Timur. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, 13(1), 40-45.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International journal of services sciences*, 1(1), 83-98.
- Sabar, Wardihan. "Sektor Potensial Pengembangan Ekonomi Wilayah Potential Sectors Of Regional Economic Development." *EcceS Economics, Social, and Development Studies* 2.1 (2015): 48-61.)
- Salvatore, D. (1996). International trade policies, industrialization, and economic development. *The International Trade Journal*, 10(1), 21-47.
- Sjafrizal, E. R. (2008). Teori dan Aplikasi. Baduouse Media, Praninta Ofset, Padang Sumatera Barat.
- SLAMET, Margono. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan. Di dalam: Sudradjat, A, &Yustina, I (Eds). *Membentuk Pola PerilakuManusia Pembangunan*, 2003, 7-13.
- Snowden, K. (2007). Competitiveness Review: An International Business Journal changes publisher. *Competitiveness Review*, 17(1/2). <https://doi.org/10.1108/cr.2007.34717aaa.001>
- Solikhatun, I. (2021). ANALISIS PRODUK UNGGULAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020. *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, 7(2), 181-190.
- Spee, R., & Douw, W. (2004). Cost-reduction location strategies. *Journal of Corporate Real Estate*, 6(1), 30–38. <https://doi.org/10.1108/14630010410812225>
- strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah Hanly Fendy Djohar Siwu : 2000
- Subaktilah, Y., Kuswardani, N., & Yuwanti, S. (2018). Analisis SWOT: Faktor internal dan eksternal pada pengembangan usaha gula merah tebu (Studi Kasus di UKM Bumi Asih, Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Agroteknologi*, 12(02), 107-115.
- Suryana, 2000:55
- Tachjan, H., Dede Mariana, and Caroline Paskarina. Implementasi kebijakan publik. *AIPI*, 2006.
- Tarigan, J., & Samuel, H. (2014). Pengungkapan sustainability report dan kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 88-101.
- Tawaqal, I., & Suparno, S. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 125-135.
- Todaro, 2000).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.
- Tutupoho, A. (2019). Analisis Sektor Basis dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). *Cita Ekonomika*, 13(1), 1-18.
- Umar, H. (2001). Riset sumber daya dalam organisasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya